

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1998), Salah satu kajian geografi adalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia (antroposfer) termasuk di dalamnya adalah kajian geografi politik.

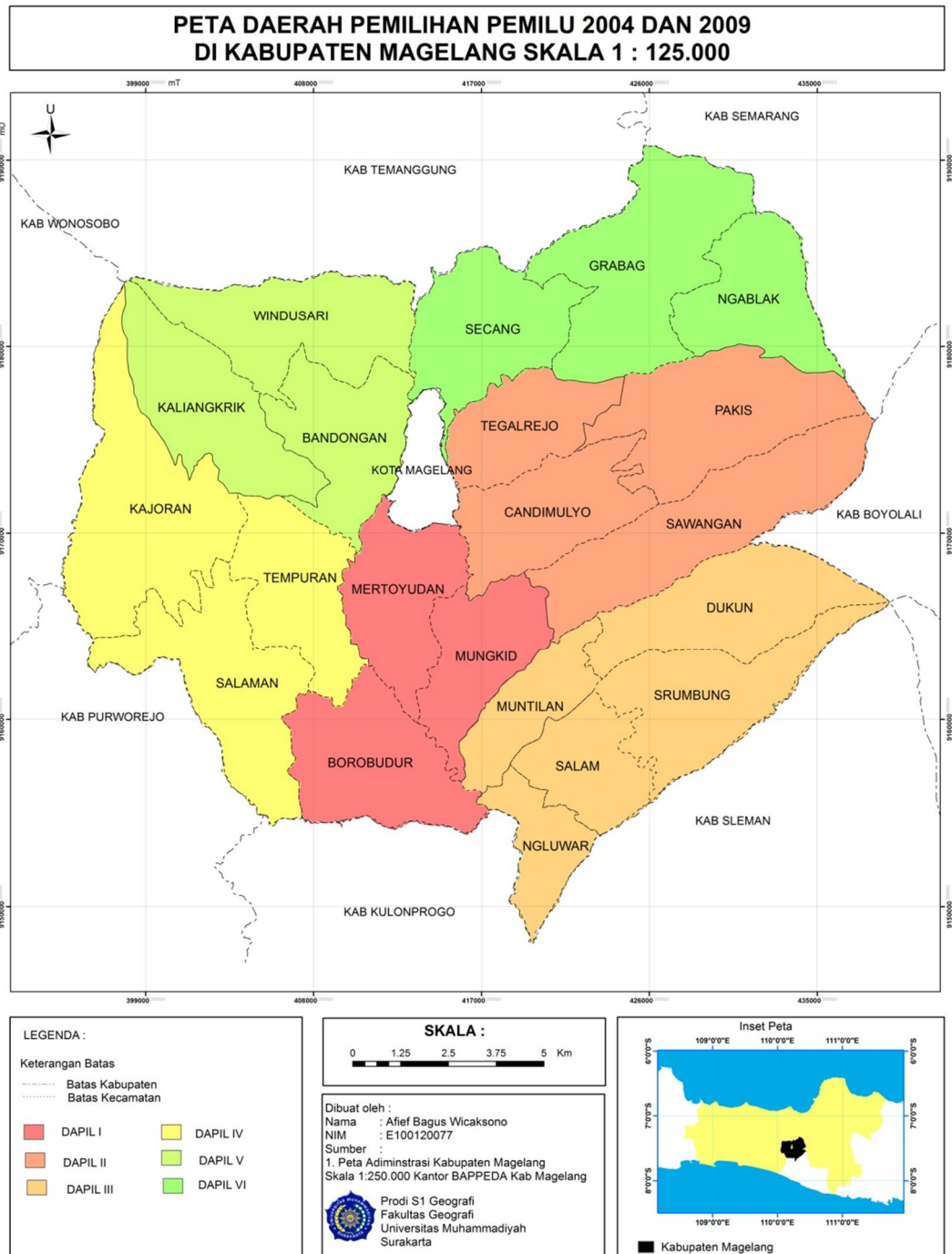
Secara aplikatif geografi dapat berperan dalam memberikan informasi spasial dan distribusi keruangan sebaran kantong suara partai politik. Dalam hal ini kajian geografi akan membantu penyajian data spasial dan temporal dari hasil pemilihan umum di suatu wilayah, dalam geografi politik pemilihan umum menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) terhadap pemilihan umum. Serta dikaji pula *Geographic Electoral* dan pengorganisasian spasial dalam suatu daerah pemilihan serta penyimpangan Pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi ruang, sehingga penduduk di suatu wilayah tidak memiliki wakil di parlemen (Jai Singh Yadav, 1996: 9).

Pada Pemilihan Umum tahun 2004 dan 2009 berdasarkan peraturan KPUD Kabupaten Magelang, wilayah di Kabupaten Magelang terdiri dari enam dapil (daerah pemilihan) adalah antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Berdasarkan Daerah Pemilihan di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Daerah Pemilihan
1	Borobudur	I
2	Mertoyudan	I
3	Mungkid	I
4	Candimulyo	II
5	Pakis	II
6	Sawangan	II
7	Tegalrejo	II
8	Dukun	III
9	Muntilan	III
10	Ngluwar	III
11	Salam	III
12	Srumbung	III
13	Kajoran	IV
14	Salaman	IV
15	Tempuran	IV
16	Bandongan	V
17	Kaliangkrik	V
18	Windusari	V
19	Grabag	VI
20	Ngablak	VI
21	Secang	VI

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magelang 2009



Gambar 1.1 Peta Dapil Kabupaten Magelang

Faktor-faktor sosiologis seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan agama (lembaga keagamaan) berpengaruh terhadap sebaran atau distribusi

perolehan suara yang ada pada masing-masing dapil tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena sejauh mana faktor-faktor sosiologis tersebut berpengaruh terhadap sebaran perolehan suara partai politik pada tiap-tiap dapil yang ada di Kabupaten Magelang, penelitian menggunakan metode kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif.

Pemasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh faktor sosiologis tersebut berpengaruh terhadap sebaran perolehan suara partai politik yang ada pada masing-masing dapil (daerah pemilihan) di Kabupaten Magelang pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka akan dilaksanakan kajian penelitian skripsi dengan judul **ANALISIS DISTRIBUSI KERUANGAN BASIS PEMILIH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DAN 2009 DI KABUPATEN MAGELANG**, sehingga diharapkan dalam kajian penelitian ini mampu memaparkan sejauh mana pengaruh faktor demografis dan sosiologis berpengaruh terhadap distribusi sebaran perolehan suara partai politik Islam dan nasionalis tiap daerah pemilihan di Kabupaten Magelang pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009. Dari hasil kajian tersebut diketahui bagaimana sebaran kantong suara partai Islam dan partai politik nasionalis, pada tiap daerah pemilihan di Kabupaten Magelang

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana distribusi keruangan perolehan suara partai politik basis massa Islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana keterkaitan atau pengaruh antara faktor sosiologis masyarakat pada tiap daerah pemilihan dengan perolehan suara partai politik basis massa Islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara partai politik basis massa Islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang.
2. Mengetahui keterkaitan atau pengaruh antara faktor sosiologis masyarakat dengan perolehan suara partai politik basis massa Islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai analisa geografi yang berkaitan dengan basis pemilih partai politik pada pemilu 2004 dan 2009.
2. Memberikan informasi wilayah yang berkaitan dengan corak politik wilayah tersebut yang mempengaruhi pilihan politik pada penduduknya.
3. Membantu para aktor politik atau pimpinan partai politik dalam menyusun strategi kampanye di tiap-tiap wilayah.

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Analisa Geografi

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981), dalam kajian geografi manusia (antroposfer) di pelajari bagaimana perilaku manusia seperti budaya, ekonomi, sosial, maupun politik. Pendekatan dalam penelitian geografi adalah menggunakan tiga pendekatan yaitu keruangan (spasial), pendekatan lingkungan (ekologis) dan pendekatan wilayah (region). Pendekatan keruangan menyangkut pola, proses dan struktur dikaitkan dengan dimensi waktu maka analisisnya bersifat horisontal. Sudut pandang kelingkungan adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada interaksi manusia dengan lingkungannya, contoh pendekatan ekologi bahwa suatu permukiman ditinjau sebagai suatu bentuk ekosistem hasil interaksi penyebaran dan aktifitas manusia dengan lingkungan alamnya. dan yang terakhir adalah pendekatan wilayah kombinasi

antara analisa keruangan dan analisa kelingkungan disebut sebagai analisa kewilayahan atau analisa kompleks wilayah, atau dengan pengertian *areal defferentiation* yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya setiap wilayah memiliki corak yang berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lain.

1.5.2 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 RUU Penyelenggaraan Pemilu).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu agenda politik yang dilaksanakan lima tahun sekali yang pada awalnya hanya untuk memilih anggota parlemen dari partai politik saja yaitu anggota DPR RI, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II, serta wakil-wakil daerah non parpol yaitu anggota DPD. Namun setelah amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 maka pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakilnya yang kemudian disebut Pilpres yang pertama kali dilakukan pada tahun 2004, dan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007 dimasukan pula mengenai pemilihan langsung kepala daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) yang kemudian dinamakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis (BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 5 RUU Penyelenggaraan Pemilu).

Tabel 1.2 Partai Politik Lolos Ambang Batas Pemilu 2004 dan 2009

No	Partai Politik	Pemilu 2004	%	Pemilu 2009	%
1	Demokrat	8.445.225	8,5	21.703.137	26
2	Golkar	24.480.757	24,7	15.037.757	17,7
3	PDI Perjuangan	21.026.629	21,2	14.600.091	17,2
4	PKS	8.325.020	8,4	8.206.955	9,6
5	PAN	7.303.324	7,4	6.254.580	7,4
6	PPP	9.248.764	9,3	5.533.214	6,5
7	PKB	11.989.564	12,1	5.146.122	6,1
8	Gerindra	-	-	4.646.406	5,5
9	Hanura	-	-	3.922.870	4,6
10	PBB	2.970.487	3	-	-
11	PBR	2.764.998	2,8	-	-
12	PDS	2.414.254	2,4	-	-

Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2009

1.5.3 Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Mengenahi Partai Politik). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sebuah organisasi atau pesyarikatan politik dengan idiologi dan cita-cita yang sama pada anggotanya guna meraih jabatan politik tertentu, yang dilakukan melalui pemilihan umum.

Partai politik menurut R.H Soltou (1996) adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka, dengan penjelasan sederhana, partai pada dasarnya merupakan fasilitas saluran aspirasi masyarakat, sehingga karenanya, ia menjadi alat sementara untuk mencapai suatu tujuan bersama.

1.5.4 Massa Pemilih

Pemilih secara umum dapat terbagi dua yaitu pemilih fanatik dan pemilih masa mengambang. Pada pemilih fanatik rasionalitasnya telah tertutupi oleh emosinya sehingga alur pikir yang rasional mengikuti gerak hati dan keyakinannya. Pada kelompok yang dikategorikan masa mengambang terdapat pemilih rasional dan irrasional, pemilih yang rasional akan memilih dengan menangkap gagasan serta program yang ditawarkan oleh partai, sedangkan pemilih yang irrasional merupakan komunitas yang memilih tanpa menggunakan rasionya untuk memilih mereka lebih condong untuk ikut-ikutan saja, mereka kurang teliti dan sering menyimpulkan informasi dengan pemahaman mereka tanpa memahami betul informasi yang mereka dapat.

Setiap orang (*voter*) dapat dari partai manapun dapat dikelompokkan lagi kedalam tiga kategori kelompok massa yang terdiri dari:

Massa simpatisan adalah kelompok massa yang cenderung memiliki keyakinan sama dengan partai yang akan dipilihnya. Misalkan seseorang memilih partai karena alasan visi, misi, dan lain sebagainya, biasanya massa simpatisan ini berada di wilayah perkotaan dan kawasan industri seperti kaum buruh yang merasa yakin dengan pilihan partai tertentu yang akan memiliki visi yang akan memperjuangkan aspirasi mereka, atau di kawasan desa yang merupakan kawasan pertanian biasanya petani ataupun buruh tani lebih memilih partai yang memiliki visi akan memperjuangkan nasib mereka (Yani, A dan Hayati, S : 2007).

Massa kader adalah kelompok massa partai yang memiliki keyakinan sekaligus keberanian dan kesetiaan pada partainya. Bahkan setiap kebiasaan pemimpinya diikuti dan dijadikan kebiasaan mereka, massa kader ini sering disebut juga sebagai massa fanatik, biasanya massa kader ini terdapat di wilayah dimana tokoh sentral di wilayah tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu partai politik, seperti tokoh kiai atau pemimpin pesantren yang memiliki hubungan dengan partai tertentu sehingga mempengaruhi pilihan politik penduduk disekitarnya, kebanyakan adalah partai dengan massa pemilih islam tradisional dan konservatif, atau massa yang memiliki ikatan emosional kuat antara

pemimpin partainya dengan akar rumput dibawahnya (Yani, A dan Hayati, S : 2007).

Massa mengambang adalah kelompok massa partai yang dipilihnya berubah-ubah. Pada saat tertentu mereka mendukung partai A tapi pada saat lain mereka mendukung partai B, ada banyak faktor yang mengakibatkan hal tersebut. Massa mengambang ini kebanyakan terdapat di wilayah kota yang penduduknya lebih sibuk dengan aktivitas dan rutinitas mereka di kantor sehingga tidak sempat memikirkan kampanye politik ataupun tidak memiliki hubungan dengan salah satu partai politik, dan juga terdapat di kawasan atau wilayah terpencil sehingga mereka sangat sulit mendapatkan akses informasi mengenai kampanye partai politik sehingga suara mereka masih mengambang dan dapat dimungkinkan setiap kali pemilu berubah pilihan politiknya (Yani, A dan Hayati, S : 2007).

1.5.5 Perubahan Basis Massa Partai Politik

Kajian geografi disuatu tempat atau wilayah berlaku untuk periode waktu tertentu. Kondisi yang ada pada suatu periode tertentu merupakan hasil dari suatu proses yang berjalan lama melalui berbagai perubahan. Geografi selalu memperhatikan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan berjalannya waktu. Demikian pula kehidupan politik di suatu Negara mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik di Negara itu. Pada masa awal Pemerintah Indonesia setelah merdeka yaitu kurun waktu 1959 – 1968 disebut periode Orde Lama dengan beberapa partai politik antara lain PNI, PKI, NU, dan Masyumi, serta beberapa partai politik lainnya, kemudian sejak Pemilu 1971 Indonesia memasuki periode Demokrasi Pancasila dengan label Orde Baru dengan tiga partai politik antara lain PDI, PPP, dan Golkar, pada tahun 1998 hingga sekarang disebut Era Reformasi dengan beberapa partai politik baru peserta pemilu.

Tabel 1.3 Perbandingan hasil Pemilu 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang

No	Partai Politik	Pemilu 2004	%	Pemilu 2009	%
1	Golkar	60.822	9,8	42.142	7,4
2	PDIP	144.877	23,2	138.150	24,2
3	PPP	95.509	15,3	62.405	10,9
4	PKB	182.597	29,3	76.945	13,5
5	PAN	75.822	12,2	56.094	9,8
6	Partai Demokrat	32.978	5,3	75.663	13,3
7	PKS	30.900	5,0	36.441	6,4
8	Partai Gerindra	-	-	42.576	7,5
9	PKNU	-	-	40.015	7,0

Sumber: KPUD Kab Magelang 2009

Perubahan perolehan suara terjadi karena terdapat beberapa partai politik baru, seperti Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), sehingga partai-partai politik baru tersebut memecah suara partai politik nasionalis dan partai politik islam, serta terdapat dua partai politik yang mengalami peningkatan perolehan suara yaitu PKS dan Partai Demokrat hal ini karena peran media dan pencitraan publik.

1.5.6 Prilaku Politik dan Geografi Pemilu

Perilaku politik atau (*Politics Behaviour*) adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.

Dalam Geografi Politik Pemilihan Umum menekankan pada lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) terhadap pemilihan umum. Disamping itu dikaji pula *Geographic Electoral* dan pengorganisasian spasial dalam suatu daerah pemilihan serta penyimpangan Pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi ruang, sehingga penduduk di suatu wilayah tidak memiliki wakil di parlemen (Jai Singh Yadav, 1996:9).

Peter Taylor dan Ronald Johnson, (dalam Glassner, 1993), menyatakan bahwa ada tiga fokus utama kajian geografi pemilu. Pertama, *the geography of voting*, yaitu kajian yang menjelaskan pola dan sebaran suatu hasil pemilu. Kedua, pengaruh faktor geografi dalam perolehan suara. Beberapa hal yang masuk di dalamnya adalah isu saat pemilu, kandidat/calon, pengaruh kampanye dan yang

paling geografis diantara semuanya (*most geographic of all*) adalah “*the neighborhood effect*” (efek ketetanggaan), yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat. Ketiga, geografi perwakilan, yaitu mencermati bagaimana sistem representasi atau sistem pemilu yang dipakai dalam sebuah wilayah, berdasarkan sistem proporsional atau distrik, menghasilkan wakil dari suatu wilayah. Penelitian ini adalah penelitian geografi politik pemilu.

Menurut *Ad Hoc Committee on Geography, Association of American Geographers* (Glassner, 1995: 3), geografi politik adalah sebagai kajian tentang interaksi antara wilayah geografis dan proses-proses politik. Jadi seorang kandidat yang mengikuti pemilihan umum (calon anggota parlemen), yang dicalonkan pada suatu distrik maka dia akan memiliki peluang menang apabila dia dicalonkan di distrik wilayah tempat tinggalnya, hal ini sejalan dengan teori *the neighborhood effect*” (efek ketetanggaan), yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat, teori tersebut sejalan dengan konsep wilayah yang merupakan kajian atau ranah dari geografi, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Harsthone dalam Daljoeni (1991: 15) mengemukakan definisi geografi politik sebagai ilmu yang mempelajari keseiringan spasial (*spatial concomitants*) dari politik atau suatu analisis geografi dari gejala politik. Gejala politik yang ditangkap oleh geografer adalah pengorganisasian ruang secara politik pada berbagai level, baik nasional, regional, maupun lokal.

1.5.7 Penelitian Sebelumnya

Handawati (2006) dalam penelitian yang berjudul “Kajian Prilaku Pemilih dalam Pelaksanaan Kepala Daerah (Prespektif Analisa Geografi)” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kajian prilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah sangat berhubungan dengan keadaan masyarakat secara demografis, sosiologis, dan psikologis untuk lebih holistik mengetahui kepala daerah pilihan masyarakat harus dilakukan melalui kajian geografi. Kajian geografi dengan ciri khas analisisnya yang bersifat keruangan dan kewilayahan dapat menjawab penelitian-penelitian sosial.

Yani, Hayati, Eridiana (2008) dalam penelitian yang berjudul “Kajian Geografi Politik Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008”

hasil penelitian ini menyimpulkan Daerah kemenangan Hade, Aman, dan Dai tidak menunjukkan pola keruangan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah politik yang relatif homogen. Faktor-faktor yang menunjukkan segregasi wilayah seperti petani, nelayan, di pegunungan, di pantai, atau berbahasa sunda, atau berbahasa jawa cirebon tidak nampak berpengaruh terhadap pilihan politik.

Glassner (1993) dalam kajian dengan judul “Political Geographic” yang berisi tentang pola dan sebaran suara partai politik di tiap distrik Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa Beberapa hal penting yang masuk ke dalamnya geografi pemilihan umum adalah isu kampanye saat pemilu, kandidat/calon, pengaruh kampanye dan yang paling geografis diantara semuanya (*most geographic of all*) adalah “*the neighborhood effect*” (efek ketetanggaan). Yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat.

Tabel 1.4 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

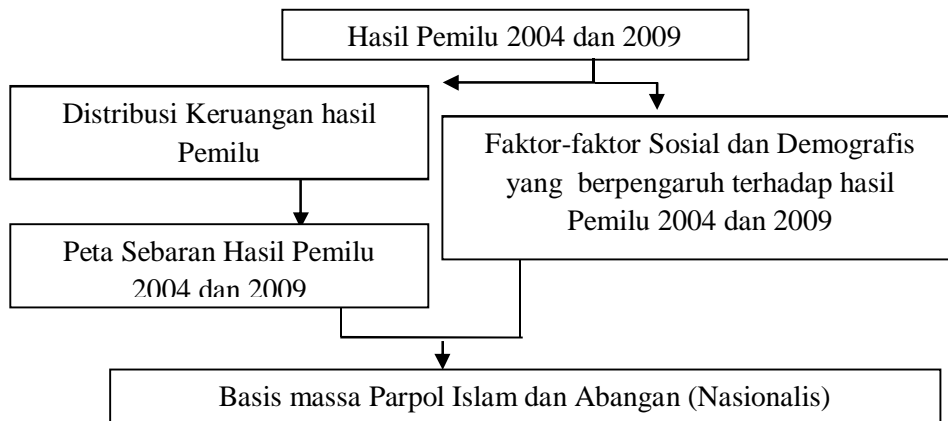
Penulis	Rayuna Hedawati	Yani, Hayati, Eridiana	Glassner	Afief Bagus W
Tahun	2006	2008	1993	2013
Judul	Kajian Prilaku Pemilih Dalam Pelaksanaan Pilkada (Prespektif Geografi)	Kajian Geografi Politik Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008	Political Geographic	Analisis Keruangan Basis Pemilih Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang
Tujuan	Mengetahui Distribusi Sebaran basis massa Calon Kepala Daerah	Mengetahui kondisi geografis kantong kemenangan pasangan Cagub Jabar 2008 Mengetahui faktor-faktor berpengaruh terhadap hasil Pilkada Jabar tahun 2008 Mengetahui apakah tiap dapil memiliki alasan-alasan yang sama untuk memilih Cagub Jabar 2008	Mengetahui pola dan sebaran hasil pemilihan umum pada distrik yang ada di Amerika Serikat	Mengetahui distribusi keruangan perolehan suara partai politik basis massa islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang. Mengetahui keterkaitan atau pengaruh antara faktor demografis dan sosiologis masyarakat pada tiap daerah pemilihan dengan perolehan suara partai politik basis massa islam dan basis massa nasionalis pada pemilihan umum tahun

				2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang.
Metode	Diskripsi Kuantitatif	Pendekatan Diskriptif	Diskriptif	Diskripsi Kuantitatif dan Kualitatif
Hasil	Kajian perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah sangat berhubungan dengan keadaan masyarakat secara demografis, sosiologis, dan psikologis untuk lebih holistik mengetahui kepala daerah pilihan masyarakat harus dilakukan melalui kajian geografi. Kajian geografi dengan ciri khas analisisnya yang bersifat keruangan dan kewilayahan dapat menjawab penelitian-penelitian sosial.	Daerah kemenangan Hade, Aman, dan Dai tidak menunjukkan pola keruangan yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah politik yang relatif homogen. Faktor-faktor yang menunjukkan segregasi wilayah seperti petani, nelayan, di pegunungan, di pantai, atau berbahasa sunda, atau berbahasa jawa cirebon tidak nampak berpengaruh terhadap pilihan politik.	Beberapa hal penting yang masuk ke dalamnya geografi pemilihan umum adalah isu kampanye saat pemilu, kandidat/calon, pengaruh kampanye dan yang paling geografis diantara semuanya (<i>most geographic of all</i>) adalah “ <i>the neighborhood effect</i> ” (efek ketetanggaan). Yaitu hubungan antara hasil pemilu dengan rumah atau distrik sang calon/kandidat	Distribusi perolehan suara partai politik basis massa Islam tradisional memperoleh sumbangan suara terbanyak di wilayah pesantren dan pedesaan dengan corak masyarakat NU, sedangkan pada partai politik basis massa Islam moderen terjadi dinamika, sebaran dan distribusi kantong suara tidak hanya mendapatkan sumbangan dari kantong massa Muhammadiyah dan Tarbiyah melainkan juga dari wilayah-wilayah basis NU, sedangkan partai politik basis massa nasionalis memiliki sebaran suara yang merata diwilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Magelang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian skripsi ini peneliti akan mengkaji distribusi keruangan atau sebaran hasil pemilu pada tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang, serta faktor-faktor sosiologis dan demografis yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang.

Perolehan suara partai politik pada pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, merupakan kajian temporal yaitu membandingkan hasil pada pemilu 2004 dan 2009. Serta kajian spasial berupa pemetaan hasil pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, dari hasil pemetaan tersebut dapat diketahui bagaimana distribusi keruangan dari hasil pemilu 2004 dan 2009.



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Dari data sekunder hasil pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, maka dapat diketahui bagaimana perolehan suara partai politik di Kabupaten Magelang, serta dapat dibandingkan hasil perolehan suara partai politik di tahun 2004 dan 2009, apakah terjadi perubahan berupa peningkatan ataupun penurunan perolehan suara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati (Moleong, 1990: 3).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini mengambil lokasi di Kabupaten Magelang, yang berada diantara $110^{\circ} 01'51''$ sampai dengan $110^{\circ} 26'28''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 19'13''$ sampai dengan $7^{\circ} 42'16''$ Lintang Selatan, serta berbatasan dengan beberapa Kabupaten antara lain sebelah utara Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Temanggung, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Purworejo, dan sebelah barat Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, serta di tengah Kabupaten Magelang terdapat Kota Magelang. Berikut ini adalah tabel gambaran kondisi sosial ekonomi Kabupaten Magelang.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Borobudur	28.496	28.094
2	Mertoyudan	48.443	49.066
3	Mungkid	33.753	35.771
4	Candimulyo	24.527	23.835
5	Pakis	27.804	28.147
6	Sawangan	28.401	28.844
7	Tegalrejo	27.329	25.189
8	Dukun	21.833	22.223
9	Muntilan	36.446	37.124
10	Ngluwar	15.177	15.064
11	Salam	22.945	21.462
12	Srumbung	22.842	22.502
13	Kajoran	28.708	28.142
14	Salaman	34.094	35.121
15	Tempuran	24.192	23.849
16	Bandongan	28.247	28.002
17	Kaliangkrik	28.404	28.712
18	Windusari	25.210	25.881
19	Grabag	43.310	43.756
20	Ngablak	20.503	20.394
21	Secang	38.046	37.785

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2009

Tabel 1.6 Prosentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan

No	Status Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	4.14	9.45
2	SD/MI	7.80	7.62
3	SLTP/MTs	5.27	4.87
4	SMA/SMK/MA	2.87	3.19
5	Diploma/Universitas	0.91	0.81
6	Tidak Besekolah Lagi	62.16	57.58

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009

1.7.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian skripsi dengan judul Analisa Keruangan Basis Massa Partai Politik Pada Pemilu 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang, terdapat

beberapa variabel antara lain kondisi demografi dan sosiologis pada tiap-tiap dapil yang berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat dan perolehan suara partai politik, antara lain jumlah lembaga pendidikan agama, jumlah da'i atau mubalig, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

1.7.4 Tahap Pengumpulan Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data skunder atau data yang diperoleh dari instansi pemerintahan dan lembaga, antara lain:

1. Peta administrasi Kabupaten Magelang skala 1:300.000 sumber data BAPPEDA Kabupaten Magelang.
2. Data Hasil pemilu atau perolehan suara partai politik tahun 2004 dan 2009 sumber data KPUD Kabupaten Magelang.
3. Data Jenis Pekerjaan masyarakat yang ada pada tiap dapil (daerah pemilihan) sumber data BPS Kabupaten Magelang dan Profil Kabupaten Magelang BAPPEDA Kabupaten Magelang.
4. Data jumlah lembaga pendidikan agama, dan mubalig sumber data Kementrian Agama Kabupaten Magelang.

1.7.5 Teknik Analisa Data

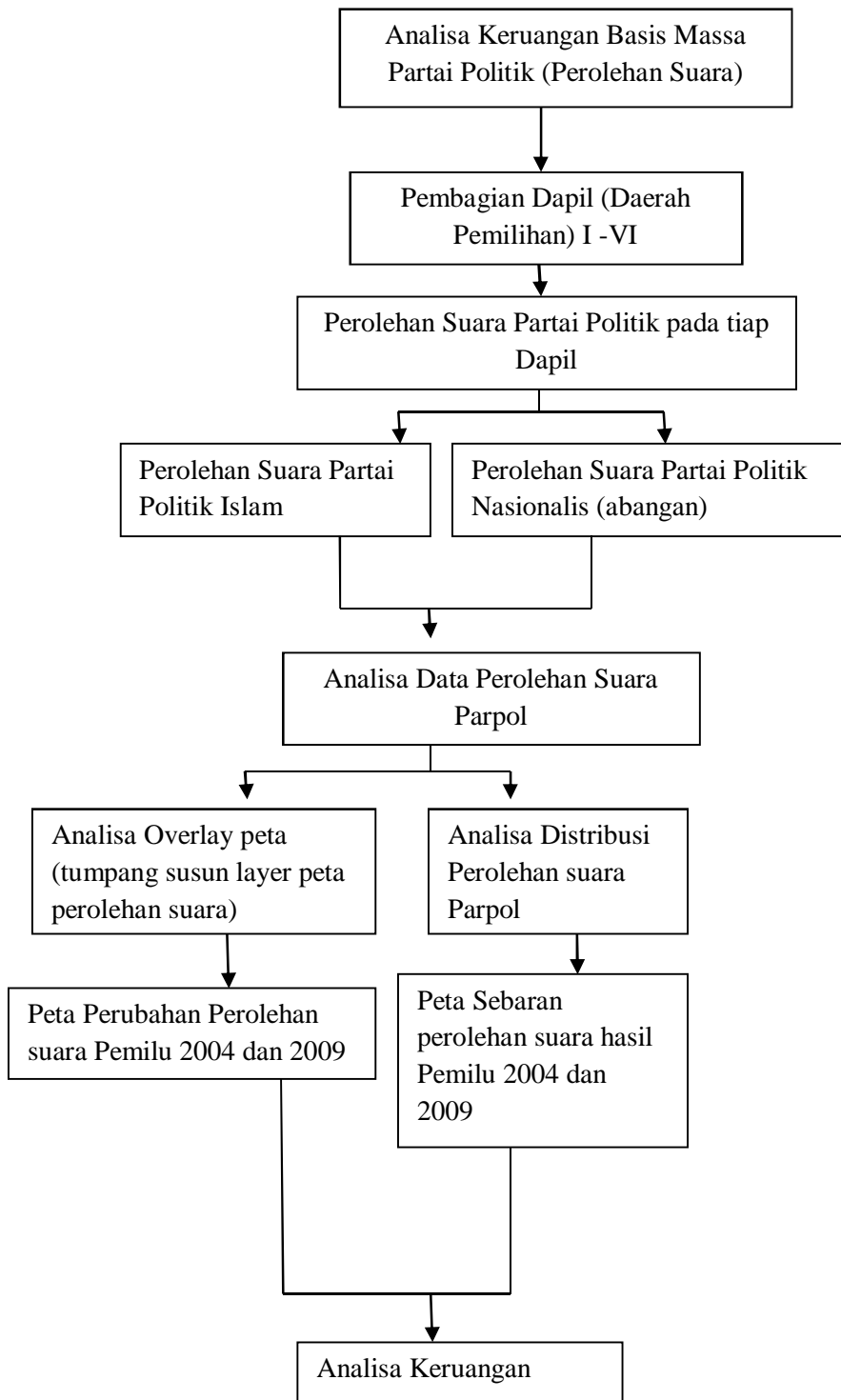
1.7.5.1 Analisa overlay atau Tumpang Susun Peta

Analisa ini digunakan dengan bantuan teknologi Sistem Informasi Geografis, dengan menumpang susunkan peta atau layer perolehan suara partai politik pada pemilu 2004 dengan peta perolehan suara pada pemilu 2009, maka dapat terlihat perubahan perolehan suara pada pemilu 2004 dengan pemilu 2009.

1.7.5.2 Analisa Distribusi

Analisa Distribusi dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebaran kantong perolehan suara partai politik pada tiap dapil (daerah pemilihan), sehingga dapat diketahui sebaran daerah potensial pada masing-masing partai politik (Islam atau abangan).

1.8 Diagram Alir Penelitian



Gambar 1.3 Diagram Alir

1.9 Batasan Operasional

1. Geografi

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1981)

2. Massa Pemilih

Massa pemilih adalah suatu kelompok orang atau warga negara yang memiliki hak politik dan berhak memilih serta dipilih dalam proses pemilihan umum yang memberikan hak suara dan pilihan politiknya terhadap suatu partai politik. (Yani, A dan Hayati, S : 2007)

3. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 Mengenahi Partai Politik).

4. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (BAB I Kententuan Umum Pasal I ayat 1 RUU Penyelenggaraan Pemilu).